

**ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM MENGOPTIMALKAN  
PENGANGKUTAN SAMPAH DI KELURAHAN TIMBANGAN  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**M. Alif Taftazani<sup>1</sup>, Junaidi<sup>2</sup>, Sinta Aryani<sup>3</sup>, Maelani<sup>4</sup>, Dhesta Adellya Santika<sup>5</sup>, Yuke Rahma Dini<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Email Korespondensi: aliftaftazani3@gmail.com

**ABSTRACT**

The problem of waste transportation in Timbangan Urban Village, Ogan Ilir Regency, is still not optimal due to limited operating fleets, irregular schedules, and inadequate personnel capacity. This condition causes waste to pile up at temporary storage sites and along roads, thereby impacting the environment and public health. This study aims to recommend policies related to waste transportation issues that can improve waste transportation performance through six Dunn evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness, and suitability. The research approach is qualitative with the support of simple quantitative analysis, through in-depth interviews, field observations, documentation, and relevant literature studies. Three policy alternatives were developed, namely adding trucks to the fleet, optimizing fleet maintenance accompanied by increasing staff capacity, and adding the number of TPS. The results of the study show that the alternative of optimizing fleet maintenance and increasing staff capacity received the highest score of 22 because it was considered more efficient, sustainable, and capable of improving operational stability without requiring a large budget. These findings confirm that strengthening maintenance and increasing staff competence are the most appropriate strategies to effectively and sustainably address waste transportation issues in Timbangan Urban Village.

**Keywords:** Policy Analysis, Waste Transportation, Timbangan Urban Village.

**ABSTRAK**

Permasalahan pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir, masih belum optimal akibat terbatasnya armada beroperasi, ketidakteraturan jadwal ritase, serta kapasitas petugas yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah di TPS maupun sepanjang jalan sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan terkait permasalahan pengangkutan sampah yang dapat meningkatkan kinerja pengangkutan sampah melalui enam kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kesesuaian. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Tiga alternatif kebijakan yang disusun, yaitu penambahan armada truk, optimalisasi pemeliharaan armada disertai peningkatan kapasitas petugas, serta penambahan jumlah TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif optimalisasi pemeliharaan armada dan peningkatan kapasitas petugas memperoleh skor tertinggi berjumlah 22 karena dinilai lebih efisien, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan stabilitas operasional tanpa kebutuhan anggaran yang besar. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pemeliharaan dan peningkatan kompetensi petugas merupakan strategi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan secara efektif dan berkelanjutan

**Kata kunci:** Analisis Kebijakan, Pengangkutan Sampah, Kelurahan Timbangan

## PENDAHULUAN

Sampah masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang berkembang (Lingga et al., 2024). Permasalahan sampah berkaitan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-12, yaitu *Responsible Consumption and Production* atau Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, khususnya target ke-5 yang menekankan pada pengurangan substansial produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali pada tahun 2030. Data worldbank menunjukkan bahwa negara di dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah setiap tahunnya dan perkiraan 33 % tidak dikelola dengan baik. Secara global, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan per orang per hari adalah 0,74 kilogram, tetapi jumlah ini masih bervariasi mulai dari 0,11 – 4,54 kilogram (The World Bank, 2025).

Di Indonesia, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2024, timbulan sampah mencapai 35.313.107,58 ton/tahun sedangkan pengurangan sampah hanya sejumlah 1.11% yang artinya sebanyak 390,278.30 ton/tahun dari 323 Kabupaten/kota se Indonesia, serta sampah yang tidak terkelola berkisar 61.37% (SIPSN, 2024b). Dilihat dari hasil presentase tersebut, bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia masih dalam kategori tinggi dan tidak diikuti oleh pengurangan sampah signifikan.

Tidak hanya di Indonesia, permasalahan sampah di Kabupaten Ogan Ilir masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah Kabupaten Ogan Ilir mencapai 64.162,47 ton/tahun, penanganan sampah sebesar 22.827,20 %, sedangkan pengurangan sampahnya hanya 15.32 ton/tahun artinya presentase pengurangan sekitar 0,02 % (SIPSN, 2024a).

Regulasi terkait penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Ogan Ilir didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 mengenai Pengumpulan Sampah, serta Pasal 19 mengenai Pengangkutan Sampah. Oleh karena itu, pengelolaan persampahan wajib diatur pemerintah daerah, seperti dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2024 memuat program ke-10 yang berfokus pada pengelolaan sampah. Namun, regulasi yang ada masih perlu disempurnakan dikarenakan penanganannya sampai saat ini belum menyelesaikan permasalahan dan masalah sampah masih terus muncul.

Sistem pengangkutan sampah merupakan bagian penting dari upaya pengelolaan sampah yang terintegrasi, karena menyangkut layanan publik esensial yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan kebersihan lingkungan. Sistem Pengangkutan Sampah di Kabupaten Ogan Ilir hingga saat ini belum berfungsi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, dari total 13 unit armada truk pengangkut sampah, hanya lima unit yang masih beroperasi aktif dan jadwal operasionalnya tidak terstruktur.

Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir di dominasi oleh aktivitas rumah tangga sebesar 75% dikarenakan pertumbuhan penduduk yang meningkatkan pesat setiap tahunnya. Tahun 2023 jumlah penduduk tetap di Kecamatan Indralaya Utara sendiri meningkat menjadi 40.651 jiwa dengan 1.021 jiwa penduduk migrasi (DUKCAPIL, 2024). Sedangkan di Kelurahan Timbangan sendiri jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 8.328 jiwa (BPS Ogan Ilir, 2024). Kemudian, berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Ogan Ilir dalam Renja tahun 2024, jumlah timbulan sampah pada rentan tahun 2020-2023 cenderung meningkat setiap tahunnya, namun realisasi sampah yang terangkut tidak mencapai target. Tahun 2023 jumlah timbulan sampah mencapai 317 m<sup>3</sup> dan sampah yang terangkut hanya 85 m<sup>3</sup>.

Akibat sampah yang tidak terangkut secara optimal, maka banyak sampah yang menumpuk di TPS dan pinggir-pinggir jalan. Kondisi inilah yang menyebabkan lingkungan kotor, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan pencemaran tanah serta udara. Sampah yang menumpuk tersebut juga dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, lalat, tikus dan lainnya, sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti demam berdarah dan diare yang membuat kesehatan masyarakat terganggu.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengangkutan sampah telah dilakukan, namun hanya

berfokus pada aspek teknis operasionalnya saja. Seperti pada penelitian (Siregar & Pharmawati, 2024), menganalisis kinerja sistem pengangkutan sampah di Bandung dengan menilai kapasitas kendaraan, frekuensi ritase, dan koordinasi operator tanpa melihat efektivitas dari kebijakan. Penelitian Nurlaeli et al., (2025), menjelaskan terkait tata kelola pengangkutan sampah di Cilegon yang menyoroti keterbatasan fasilitas dan inefisiensi operasional tanpa adanya kerangka analisis kebijakan dalam mengevaluasi pelaksanaan peraturan daeran. Kemudian penelitian Tingkue et al., (2025) yang menjelaskan permasalahan terkait kekurangan armada dan jadwal pengangkutan yang tidak konsisten, tetapi tidak menganalisis sejauh mana kebijakan dari pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian terkait pengangkutan sampah khususnya di Kelurahan Timbangan dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn.

Teori analisis kebijakan William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan harus memperhatikan enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kesesuaian (Dunn, 2018).

1. Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi menilai perbandingan antara usaha atau biaya yang dikeluarkan dengan tingkat efektivitas yang dicapai.
3. Kecukupan mengukur sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi tingkat minimum efektivitas atau efisiensi yang telah ditetapkan sebagai ambang batas yang dianggap layak.
4. Keadilan berkaitan dengan distribusi hasil dan usaha secara adil di antara kelompok masyarakat.
5. Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan, preferensi, dan aspirasi kelompok sasaran.
6. Kesesuaian berhubungan dengan sejauh mana kebijakan layak untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan tujuan untuk merekomendasikan kebijakan terkait permasalahan pengangkutan sampah yang dapat meningkatkan kinerja pengangkutan sampah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung analisis kuantitatif sederhana untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kesesuaian berdasarkan kriteria evaluasi Dunn. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan. Pada tahap awal, penelitian menerapkan metode perumusan masalah melalui klasifikasi. Selanjutnya, penyusunan alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode status quo dan quick survey. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat, dan mahasiswa setempat. Data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi literatur mencakup dokumen pemerintah dan penelitian terdahulu.

Analisis data menggunakan model Miles & Huberman, yang meliputi proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak relevan, serta mengorganisasikan data hingga simpulan dapat ditarik dan diverifikasi secara sistematis (Fadjarajani et al., 2020). Temuan kualitatif kemudian diperkuat dengan pendekatan kuantitatif sederhana, bukan sebagai analisis statistik, melainkan sebagai penyetaraan skor untuk meningkatkan objektivitas dan konsistensi penilaian pada setiap kriteria evaluasi Dunn.

## PEMBAHASAN

### Pernyataan Kebijakan

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk menilai permasalahan pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan kabupaten Ogan Ilir secara komprehensif serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja layanan, khususnya terkait keterbatasan armada, jadwal pengangkutan yang tidak teratur, dan kapasitas operasional yang belum optimal. Kebijakan yang dikaji berlandaskan Perda No. 5 Tahun 2020, RPJMD, dan Renja Dinas Lingkungan Hidup, dengan fokus pada pengelolaan dan pengangkutan sampah sebagai bagian dari layanan publik dasar. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala struktural dan faktor-faktor yang menyebabkan pengangkutan sampah tidak berjalan optimal. Selain itu, analisis kebijakan ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan penumpukan sampah di Kelurahan Timbangan, sehingga mampu meningkatkan kinerja pengangkutan sampah dan mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.

Profil kebijakan yang akan dihasilkan dari analisis ini adalah kebijakan yang dapat memperkuat sistem pengangkutan sampah melalui peningkatan kapasitas armada, perbaikan tata kelola operasional, serta penataan fasilitas pendukung. Kebijakan ini berfokus pada optimalisasi jumlah dan fungsi armada melalui pengadaan maupun pemeliharaan, peningkatan kompetensi petugas DLH, penambahan dan penataan TPS yang representatif, serta pengaturan jadwal layanan yang lebih terstruktur. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan sehingga mampu mengurangi penumpukan sampah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pengelolaan sampah daerah sesuai amanat Perda No. 5 Tahun 2020 serta target Indonesia Bersih Sampah 2025.

### Kriteria Evaluasi

Analisis Kebijakan ini menggunakan pendekatan rasional analitis yang didasarkan pada teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003). Teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2003) ini digunakan pada tahap penilaian terhadap alternatif kebijakan dengan menerapkan enam indikator evaluatif, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kesesuaian (*Public Policy Analysis An Integrated Approach by William N. Dunn*). Setiap kriteria dibuat skala penilaian 1-5. Berikut beberapa penjelasan terkait dengan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003):

#### 1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian hasil atau tujuan yang diharapkan dari kebijakan pengangkutan sampah. Kriteria ini menilai sejauh mana rekomendasi kebijakan berhasil menghasilkan output atau outcome yang bernilai bagi masyarakat. Jika presentase kriteria melebihi 100% bernilai 5 (sangat efektif), presentase 75-100% bernilai 4 (efektif), presentase 50-75% bernilai 3 (cukup efektif), presentase 25-50% bernilai 2 (tidak efektif), presentase 0-25% bernilai 1 (sangat tidak efektif).

#### 2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara usaha atau biaya yang dikeluarkan dengan tingkat efektivitas yang dicapai. Jika presentase kriteria 0-60% bernilai 5 (sangat efisien), presentase 60-80% bernilai 4 (efisien), presentase 80-90% bernilai 3 (cukup efisien), presentase 90-100% bernilai 2 (tidak efisien), presentase melebihi 100% bernilai 1 (sangat tidak efisien).

#### 3. Kecukupan

Kecukupan mengukur sejauh mana masalah timbulan sampah dapat terangkut sesuai target yang ditetapkan. Jika presentase kriteria melebihi 100% bernilai 5 (sangat cukup), presentase 75-100% bernilai 4 (cukup), presentase 50-75% bernilai 3 (sedang), presentase 25-50% bernilai 2 (tidak cukup), presentase 0-25% bernilai 1 (sangat tidak cukup).

#### 4. Keadilan

#### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

Keadilan berkaitan dengan apakah pengangkutan sampah berhasil menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Jika presentase kriteria melebihi 100% bernilai 5 (sangat adil), presentase 75-100% bernilai 4 (adil), presentase 50-75% bernilai 3 (cukup adil), presentase 25-50% bernilai 2 (tidak adil), presentase 0-25% bernilai 1 (sangat tidak adil).

## 5. Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan pengangkutan sampah yang direkomendasikan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran. Nilai responsivitas diperoleh dari hasil wawancara kualitatif yang dikodekan dalam bentuk Skala Likert 1–5, kemudian dikonversi ke dalam persentase. Jika persentase responsivitas melebihi 100% bernilai 5 (sangat responsif), persentase 75-100% bernilai 4 (responsif), persentase 50-75% bernilai 3 (cukup responsif), persentase 25-50% bernilai 2 (tidak responsif), dan persentase 0-25% bernilai 1 (sangat tidak responsif). Konversi ini digunakan untuk menyetarakan hasil penilaian kualitatif sehingga dapat dibandingkan secara konsisten dengan kriteria evaluasi lainnya.

## 6. Kesesuaian

Kriteria kesesuaian berhubungan dengan sejauh mana kebijakan pengangkutan sampah layak untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Skor kesesuaian yang diperoleh dari pendapat masyarakat kemudian dihitung rata-ratanya dan dikonversi ke dalam bentuk persentase. Persentase di atas 100% dikategorikan 5 (sangat sesuai), persentase 75-100% dikategorikan 4 (sesuai), persentase 50-75% dikategorikan 3 (cukup sesuai), persentase 25-50% dikategorikan 2 (tidak sesuai), dan persentase 0-25% dikategorikan 1 (sangat tidak sesuai). Konversi ini bukan analisis statistik, tetapi merupakan bentuk penyetaraan agar hasil penilaian kualitatif dapat dibandingkan secara konsisten dengan indikator evaluasi lainnya.

## Analisis Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan terhadap sistem pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan, diperlukan penyusunan beberapa alternatif kebijakan yang dapat menjadi dasar perbaikan. Alternatif kebijakan ini disusun untuk memberikan pilihan solusi yang realistis dan aplikatif dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

### 1. Penambahan Jumlah Armada Truk Pengangkut Sampah

Alternatif pertama ini dirumuskan melalui metode status quo, yakni metode yang berkaitan dengan perbaikan serta penyempurnaan kebijakan yang telah berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

Permasalahan utama yang masih muncul di lapangan adalah terbatasnya jumlah armada truk pengangkut sampah, sehingga proses pengangkutan tidak berjalan optimal dan menimbulkan penumpukan di sejumlah titik. Oleh karena itu, penambahan armada merupakan langkah perbaikan yang relevan dengan peningkatan jumlah truk pengangkut, sehingga proses operasional menjadi lebih cepat dan target volume pengangkutan harian lebih memungkinkan untuk dicapai.

### 2. Optimalisasi Pemeliharaan Armada disertai Peningkatan Kapasitas Petugas DLH

Alternatif kedua ini dirumuskan melalui metode quick survey, yakni metode pengumpulan informasi secara langsung dari para aktor yang terlibat di lapangan, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat, serta mahasiswa. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh saran, masukan, serta persepsi terkait permasalahan pengangkutan sampah dan kebutuhan perbaikannya.

Alternatif ini menggabungkan aspek pemeliharaan armada dengan peningkatan kapasitas petugas, karena keberhasilan pengangkutan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran maupun peralatan, tetapi juga oleh kompetensi petugas DLH dalam merawat, mengoperasikan, dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan.

### 3. Penambahan Jumlah TPS

#### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Alternatif ketiga ini dirumuskan melalui metode quick survey, yakni metode pengumpulan informasi secara langsung dari para aktor yang terlibat di lapangan, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat, serta mahasiswa. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh saran, masukan, serta persepsi terkait permasalahan pengangkutan sampah dan kebutuhan perbaikannya.

Saat ini jumlah TPS yang ada di kelurahan timbangan sangat sedikit dengan jarak yang berjauhan, sehingga masyarakat kesulitan dalam membuang sampah. Dengan adanya penambahan jumlah TPS diharapkan terjadinya penertiban dalam pengumpulan sampah, pengurangan pembuangan sampah secara liar dan mendukung kelancaran pengangkutan yang dilakukan oleh petugas DLH.

Berikut tabel perbandingan untuk kelebihan dan kekurangan setiap alternatif kebijakan yang direkomendasikan:

**Tabel 1: Perbandingan Kekurangan dan Kelebihan Alternatif Kebijakan**

| No. | Alternatif Kebijakan  | Kelebihan  | Kekurangan  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Penambahan armada truk pengangkut sampah                                    | Meningkatkan kapasitas angkut harian, memperluas jangkauan layanan, mengurangi penumpukan sampah                           | Membutuhkan anggaran besar, risiko kerusakan kembali jika pemeliharaan tidak optimal.                   |
| 2.  | Optimalisasi pemeliharaan armada disertai peningkatan kapasitas petugas DLH | Biaya lebih rendah, dapat meningkatkan umur armada, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat tanggap lapangan   | Tidak mengatasi total timbulan sampah jika volume meningkat, dan pelatihan membutuhkan waktu.           |
| 3.  | Penambahan jumlah TPS   | Mengurangi pembuangan sampah secara ilegal, sehingga mempermudah warga membuang sampah, dan mengurangi beban ritase armada | Membutuhkan lahan, selain itu membutuhkan pengawasan agar TPS tidak menumpuk, dan biaya pembangunan TPS |

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2025)

Tabel perbandingan diatas menunjukkan setiap alternatif memiliki kekurangan dan kelebihan, alternatif dua lebih efisien dan berkelanjutan karena meningkatkan keandalan armada serta kompetensi petugas, meskipun dampaknya tidak terlihat secara langsung.

## Rekomendasi Kebijakan

Dalam upaya mengatasi permasalahan pengangkutan sampah di Kabupaten Ogan Ilir, dilakukan analisis perbandingan terhadap tiga alternatif kebijakan, yaitu Penambahan Armada Truk Pengangkut Sampah, Optimalisasi Pemeliharaan Armada serta Peningkatan Kapasitas SDM, dan Penambahan Jumlah TPS. Ketiga alternatif ini dievaluasi berdasarkan enam kriteria utama, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kesesuaian. Setiap alternatif diberikan nilai berdasarkan tingkat pencapaiannya terhadap masing-masing kriteria, dengan skala penilaian 1-5. Melalui penilaian tersebut, diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang paling tepat, efisien, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pengangkutan sampah serta memperbaiki pelayanan publik di sektor kebersihan daerah. Tabel berikut disusun untuk menyajikan hasil analisis secara ringkas, jelas, dan memudahkan penarikan kesimpulan akhir.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

145

Indexed



**Tabel 2: Perbandingan Alternatif Kebijakan**

| Kriteria Evaluasi   | Rekomendasi Alternatif Kebijakan                 |  |                              |
|---------------------|--|--|------------------------------|
|                     | Ops 1 : Penambahan armada truk pengangkut sampah | Ops 2: Optimalisasi pemeliharaan armada disertai peningkatan kapasitas petugas DLH | Ops 3: Penambahan jumlah TPS |
| Efektifitas         | Efektif (4)                                      | Cukup Efektif (3)  | Cukup Efektif (3)            |
| Efisiensi           | Tidak Efisien (2)                                | Efisien (4)  | Tidak Efisien (2)            |
| Kecukupan           | Cukup (4)  | Cukup (4)  | Sedang (3)                   |
| Keadilan            | Adil (4)   | Adil (4)   | Adil (4)                     |
| Responsivitas       | Cukup Responsif (3)                              | Cukup Responsif (3)  | Responsif (4)                |
| Kesesuaian          | Sesuai (4)                                       | Sesuai (4)   | Sesuai (4)                   |
| <b>Jumlah Nilai</b> | <b>21</b>  | <b>22</b>  | <b>20</b>                    |

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam kriteria Dunn (2003), alternatif kedua optimalisasi pemeliharaan armada disertai peningkatan kapasitas petugas DLH mendapatkan skor tertinggi yaitu 22, mengungguli alternatif penambahan armada yang memperoleh skor 21 dan penambahan TPS dengan skor 20. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif kedua lebih komprehensif dalam menyelesaikan akar persoalan pengangkutan, yaitu kerusakan armada, ketidakteraturan operasional, dan keterbatasan kapasitas petugas. Selain berbiaya lebih efisien dibanding penambahan armada baru, alternatif ini memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi serta responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagian implementasi memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana rekomendasi kebijakan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah. Tahapan implementasi disusun untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada perumusan konseptual, tetapi dapat diterapkan secara sistematis melalui penguatan armada, pemeliharaan kendaraan, penataan TPS, dan peningkatan kapasitas petugas. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan kebijakan sekaligus mengatasi akar masalah utama seperti ketidakteraturan jadwal, minimnya armada layak pakai, dan penumpukan sampah. Dengan indikator monitoring yang jelas, implementasi ini menjadi dasar pengukuran keberhasilan kebijakan di Kelurahan Timbangan.

Untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang terpilih dapat diterapkan secara efektif, diperlukan langkah implementasi yang rinci, realistis, dan sesuai dengan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan hasil evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kriteria Dunn, alternatif "optimalisasi pemeliharaan armada disertai peningkatan kapasitas petugas" dipilih karena dinilai paling mampu menjawab akar persoalan teknis pengangkutan sampah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah implementasi berikut disusun untuk memberikan panduan operasional yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga kebijakan ini tidak hanya berhenti pada tataran rekomendasi, tetapi benar-benar dapat dioperasionalkan dan menghasilkan perbaikan nyata terhadap kinerja pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan.

#### 1. Pembentukan Tim Teknis Pemeliharaan Armada DLH.

Tim ini terdiri dari mekanik, sopir senior, dan staf pendukung yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan harian dan pemeliharaan ringan. Pembentukan tim ini penting untuk memastikan adanya unit khusus yang berfokus pada pemeliharaan preventif sehingga kerusakan dapat diidentifikasi lebih awal dan downtime armada dapat ditekan.

#### 2. Penyusunan dan Penerapan SOP Pemeliharaan Rutin.

SOP pemeliharaan disusun untuk menjadi pedoman baku terkait frekuensi pemeriksaan, standar perawatan, dan mekanisme pelaporan kerusakan. SOP ini memastikan setiap petugas memahami prosedur kerja yang benar, sehingga downtime kendaraan dapat ditekan dan operasional pengangkutan

berjalan lebih stabil.

### 3. Pelatihan Teknis dan Manajerial bagi Petugas DLH.

Pelatihan diberikan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam perawatan ringan, pengelolaan rute, dan keselamatan kerja. Kerja sama dengan bengkel lokal, SMK, atau Politeknik akan memperkuat kualitas pelatihan. Peningkatan kapasitas ini penting agar petugas dapat menangani masalah teknis sederhana tanpa menunggu bantuan eksternal.

### 4. Alokasi Anggaran Tetap untuk Pemeliharaan Armada.

Pemerintah Kabupaten menetapkan porsi anggaran tetap dalam belanja operasional DLH, minimal 5%, untuk mendukung pemeliharaan berkala dan pelatihan petugas. Anggaran yang konsisten menjamin keberlanjutan program sehingga pemeliharaan tidak terhenti akibat fluktuasi pendanaan.

### 5. Pengembangan Sistem Pelaporan Cepat Kerusakan dan Kinerja Armada.

DLH mengembangkan mekanisme pelaporan berbasis aplikasi sederhana atau formulir digital untuk melaporkan kerusakan, keterlambatan, atau kendala operasional secara real time. Sistem pelaporan ini mempercepat respons perbaikan serta memungkinkan monitoring yang lebih akurat.

### 6. Evaluasi Tahunan Kinerja Armada dan Petugas

Evaluasi dilakukan terhadap indikator seperti jumlah armada beroperasi, waktu ritase, downtime kendaraan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan SOP dan perencanaan pemeliharaan tahun berikutnya, sehingga kebijakan tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan lapangan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama pengangkutan sampah di Kelurahan Timbangan terletak pada rendahnya kinerja operasional yang dipengaruhi oleh terbatasnya operasional armada, ketidakteraturan jadwal ritase, serta kapasitas petugas yang belum memadai. Melalui evaluasi menggunakan enam kriteria Dunn, ditemukan bahwa kebijakan yang berjalan saat ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif maupun berkelanjutan. Hasil analisis terhadap tiga alternatif kebijakan menunjukkan bahwa optimalisasi pemeliharaan armada disertai peningkatan kapasitas petugas DLH merupakan pilihan terbaik karena memiliki skor alternatif sebesar 22 dengan tingkat efisiensi tinggi, reliabilitas operasional yang lebih stabil, serta tingkat kesesuaian dan responsivitas yang lebih kuat dibandingkan alternatif lainnya. Rekomendasi ini diperkuat oleh temuan kuantitatif sederhana yang menunjukkan peningkatan potensi efektivitas dan kecukupan layanan apabila pemeliharaan armada dilakukan secara sistematis dan petugas dilengkapi dengan kompetensi teknis yang memadai. Implementasi kebijakan ini perlu dilakukan melalui penyusunan SOP pemeliharaan, pembentukan tim teknis, pelatihan berkala, alokasi anggaran tetap, serta sistem pelaporan kerusakan berbasis digital. Tahap-tahap implementasi tersebut tidak hanya menjadi tindak lanjut dari penelitian ini, tetapi juga memberikan arah strategis bagi DLH Kabupaten Ogan Ilir dalam memperbaiki layanan pengangkutan sampah secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.

## REFERENSI

- BPS Ogan Ilir. (2024). *Kecamatan Indralaya Utara dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir. <https://oganalirkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8507e7bb22e33967f17da215/kecamatan-indralaya-utara-dalam-angka-2024.html>
- DUKCAPIL. (2024). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024*. Dukcapil.Oganilirkab.Go.Id. <https://dukcapil.oganalirkab.go.id/uploads/1/buku-profil-2024-fix-watermark.pdf>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (New York). Taylor & Francis Group.
- BPS Ogan Ilir. (2024). *Kecamatan Indralaya Utara Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

147

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Ogan Ilir.

<https://oganilirkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/8507e7bb22e33967f17da215/kecamatan-indralaya-utara-dalam-angka-2024.html>

DUKCAPIL. (2024). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024*. Dukcapil.Oganilirkab.Go.Id. <https://dukcapil.oganilirkab.go.id/uploads/1/buku-profil-2024-fix-watermark.pdf>

Fadjarajani, Dr. S., Rosali, E. S., & Patimah, Prof. Dr. Hj. S. (2020). *II.C.3 Book Chapter Bab Xvi (1)*. file:///C:/Users/PF4DW/Downloads/II.C.3%20BOOK%20CHAPTER%20BAB%20XVI%20(1).pdf

Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., & Sitorus, C. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12235–12247. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14542/9728>

Nurlaeli, R., Frinaldi, A., Rembrandt, R., Lanin, D., & Umar, G. (2025). Menelaah Tata Kelola Pengangkutan Sampah Dan Analisis Dampak Lingkungan Di Kota Cilegon: Kajian Literatur. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 14(2), 146–160. <https://doi.org/10.21009/jgg.142.04>

SIPSN. (2024a). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/capaian>

SIPSN. (2024b). *Data capaian dibawah ini adalah hasil dari penginputan data yang dilakukan oleh 342 Kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2024*. SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/>

Siregar, F. H., & Pharmawati, K. (2024). Analisis Kinerja Sistem Pengangkutan Sampah di TPS Sub Wilayah Kota Cibeunying, Bandung. *Infomatek*, 26(2), 273–284. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v26i2.19317>

The World Bank. (2025). *Tren dalam Pengelolaan Sampah Padat*. The World Bank. [https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends\\_in\\_solid\\_waste\\_management.html](https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html)

Tingkue, N. N., Riogilang, H., & Legrans, R. R. I. (2025). Evaluasi Sistem Pengangkutan Dan Pewadahan Sampah di Kecamatan Sario Kota Manado. *TEKNO*, 23(91), 665–674. <https://doi.org/10.35793/jts.v23i91.61694>